



KERUNTUHAN REZIM EVO MORALES DI BOLIVIA

Muhaimin Zulhair Achsin¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, Indonesia;
muhamin.zul@ub.ac.id

Abstract

This article presents a question “what are the influences of political factors on the fall of the Evo Morales’ regime in Bolivia?”. This article aims to describe the influence of political factors on the fall of Morales’ regime. This qualitative study uses the theory of regime survive and fall developed by Mainwaring and Linan. The findings are that there are three variables namely preferences, policies, and international politics that contributed to the fall of Evo Morales’ regime with the particular condition. Three premises that related to the political opposition offered by Mainwaring and Linan are also valid in this study, however political blunder has also likely contributed to the growing of political opposition.

Keywords: Bolivia, Evo Morales, political factor, regime

Abstrak

Artikel ini mengajukan pertanyaan “apa pengaruh faktor politik terhadap runtuhnya rezim Evo Morales di Bolivia?”. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh faktor politik terhadap runtuhnya rezim Morales. Teori yang dipakai adalah teori bertahan dan runtuhnya suatu rezim dari Mainwaring dan Linan. Temuan artikel ini yaitu tiga variabel yakni preferensi, kebijakan, dan politik internasional memengaruhi runtuhnya rezim Evo Morales dengan kondisi yang berbeda. Tiga premis yang berkaitan dengan oposisi yang ditawarkan Mainwaring dan Linan juga ada dalam artikel ini, namun faktor penguasa salah langkah juga memengaruhi membesarnya oposisi dalam menekan rezim berkuasa.

Kata Kunci: Bolivia, Evo Morales, faktor politik, rezim

Pendahuluan

Dalam bentangan sejarah negara-negara Amerika Latin modern sebelum kemunculan Evo Morales, belum ada tokoh masyarakat adat yang berhasil menjadi presiden. Evo Morales merupakan tokoh masyarakat pribumi pertama di Amerika Latin yang naik ke kursi jabatan politik tertinggi yaitu presiden di abad 21. Ketika awal Evo Morales memenangkan pemilu pada

Desember 2005, ada semangat kegembiraan yang meluap dari masyarakat adat di Bolivia setelah sekian lama dalam dominasi elit *white-mestizo*.

Farthing & Kolh (2014: 35) mendeskripsikan pada Januari 2006—awal Morales berkantor—puluhan ribu masyarakat menari dan menyanyi di jalan-jalan di kota La Paz dalam rangka merayakan sosok presiden baru mereka yang berasal dari akar rumput. Morales diberi julukan *apu mallku* yang berarti pemimpin penuh. Rakyat Bolivia berharap Evo Morales dapat mengangkat derajat kaum miskin dan marginal. Menurut Thomson dkk., (2018: 623, 627) Morales disamakan dengan pahlawan Aymara tiga abad silam yang bernama Tupac Katari dan tumpuan harapan *pachakuti*¹

Evo Morales ikut pada pemilihan umum 2005 di Bolivia dengan mengendarai partai etnik MAS (*Movimiento al Socialismo*). Morales dari partai MAS mampu meraih suara 53,7% mengalahkan Jorge Quiroga dari partai PODEMOS yang hanya meraup 28,6% suara pada pemilihan tersebut (Hirseland & Strijbis, 2019).

Kemenangan besar tersebut dapat diprediksi karena peristiwa politik beberapa tahun sebelumnya. Van Cott (2005: 97) menyatakan bahwa pada Oktober 2003 terjadi demonstrasi besar-besaran terkait isu gas di Bolivia. Demonstrasi tersebut yang dipimpin oleh Morales, Quispe, dan lainnya memaksa presiden Sanchez—presiden yang kuliah di Amerika Serikat ini—terbang meninggalkan Bolivia. MAS juga merupakan contoh dari gerakan sosial berbasis etnik yang bertransformasi menjadi partai politik yang sukses. Selain keberhasilan menggulingkan presiden Sanchez, peluang Morales dan partai MAS untuk mendulang konstituen sangat besar karena populasi pribumi pada 2001 di Bolivia sebanyak 49,4% serta momentum politik waktu itu (Madrid, 2012).

Terpilihnya Morales menjadi presiden Bolivia tahun 2005 merupakan hasil dari proses politik dalam negeri dan luar negeri dalam hal ini regional Amerika Latin. Morales menjadi tokoh penjawab dari ketidakstabilan politik domestik Bolivia ketika masa kepemimpinan presiden sebelumnya yaitu Gonzalo Sanchez dan Carlos Mesa yang menerapkan ekonomi neoliberal ala Konsensus Washington (privatisasi, deregulasi dan sebagainya). Evo Morales juga tidak bisa dilepaskan dari fenomena gelombang merah muda yang menyapu kawasan Amerika Latin dimulai sejak naiknya politisi kiri Hugo Chavez menjadi presiden tahun 1999 di Venezuela. Momentum

¹ Istilah Andes untuk transformasi ruang dan waktu ketika pribumi kembali menjadi pemimpin

dan peluang politik menjadikan Evo Morales sebagai sosok yang dinantikan masyarakat mayoritas di Bolivia saat itu.

Semenjak kemenangan presiden Morales, partai etnik MAS menjadi partai penguasa yang tidak hanya mendominasi pemilihan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi dan kota. Pada 2009, Evo Morales yang mengendarai partai MAS menang lagi dalam pemilihan presiden dengan memperoleh 64,2% suara mengungguli Mafred Villa dari PPB-CN yang hanya meraih 26,5% suara (Hirseland & Strijbis, 2019). Hal ini membuktikan kinerja presiden Morales jilid satu dan mesin partai MAS bekerja dengan baik pada arus atas maupun arus bawah.

Kebijakan populis Evo Morales jilid satu cepat merespons persoalan politik yang menjadi perhatian besar rakyat Bolivia waktu itu. Respons kebijakan tersebut antara lain rancangan draf konstitusi baru yang banyak mengakomodasi kepentingan masyarakat adat (dirancang 2006, disahkan 2009), nasionalisasi perusahaan gas, desentralisasi fiskal dan ekonomi, memotong lebih 50% gajinya untuk memperbanyak guru, melegalkan perkebunan koka, dan sebagainya (Kohl, 2010). Antropolog Nancy Postero (2017) mengistilahkan fenomena tersebut dengan frasa *indigenous state-making* yaitu menyuntikkan jiwa, keberpihakan, dan cita rasa *indigenous* yang sangat khas pada negara.

Pasal 168 dalam konstitusi baru Bolivia tahun 2009 menyebutkan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden yakni selama 5 tahun dan hanya diberi kesempatan menjadi presiden maksimal dua periode berturut-turut (Constitution, 2009). Jika dilihat dari aturan tersebut, maka masa jabatan periode kedua Morales tahun 2009-2014 adalah masa jabatan yang terakhir atau tidak dapat diperpanjang lagi. Namun, Morales mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan berpendapat bahwa konstitusi baru tersebut yang mengubah bentuk negara Bolivia dari republik menjadi bentuk plurinasional tidak berlaku surut, sehingga periode 2009-2014 dapat dikatakan periode pertama Morales menjabat dengan konstitusi baru. Hakim mengabulkan permohonan tersebut, sehingga Morales dapat maju lagi sebagai kandidat presiden Bolivia di pemilihan berikutnya.

Evo Morales memenangkan kembali kursi kepresidenan Bolivia pada pemilu Oktober 2014. Morales melalui partai MAS mendapatkan suara terbanyak yaitu 61,4% suara, lalu diikuti kandidat dari partai *Democrat Unity* yaitu Samuel Doria Medina yang meraih 24,2% suara. Morales dan Medina terpaut selisih 37,2% suara (Hirseland & Strijbis, 2019).

Sampai pada Morales jilid tiga, angka-angka menunjukkan keberhasilannya sebagai seorang presiden di negara yang berpopulasi lebih dari 11 juta orang ini. Oliver Balch (2019) menuliskan bahwa rentang 2006-2017 terjadi penurunan persentase kemiskinan di Bolivia yaitu dari 59,9% menjadi 34,6%. Kemiskinan ekstrem turun dari 38,2% menjadi 15,2%. Pertumbuhan stagnan di kisaran 4,9%. Terjadi kenaikan pendapatan dari sektor gas yang rata-ratanya dari USD 1,4 milyar per tahun menjadi USD 7 milyar per tahun dalam masa jabatan periode pertama. Upah minimum per bulan meningkat tiga kali lipat menjadi 2.060 boliviano (setara Rp. 4 juta). Pemberian dana pensiunan sebesar 300 boliviano (setara Rp. 600.000) per bulan. Kenaikan belanja infrastruktur dasar seperti sekolah, rumah sakit, pembangkit listrik, irigasi dan sebagainya naik dari USD 629 juta pada 2005 menjadi USD 6,5 milyar pada 2018. Terakhir adalah pembangunan gedung istana negara pencakar langit 29 lantai sebagai simbol kemajuan yang dicapai negara plurinasional (multi-etnik) Bolivia. Berdasarkan data PBB, pada 2005 GDP Bolivia sebesar USD 9 milyar meningkat menjadi USD 37 milyar pada 2019. GDP per kapita pada 2005 sebanyak USD 1.046 meningkat menjadi USD 3.390 pada 2019. Jumlah kedatangan turis dari 524 ribu jiwa pada 2005 meningkat menjadi 1,3 juta jiwa pada 2019 (UN, 2020).

Namun, tidak serta merta perubahan dan keberhasilan tersebut mampu menopang rezimnya untuk kembali berkuasa di periode keempat. Akhirnya, tokoh adat tersukses ini pada November 2019 terbang ke Meksiko lalu ke Argentina untuk mencari suaka, tanda rezimnya runtuh setelah lebih dari 13 tahun bertahan. Mengulang sejarah 2003 dengan perbedaan Morales-lah yang kini terbang meninggalkan Bolivia.

Artikel ini mengajukan pertanyaan apa pengaruh faktor politik terhadap runtuhnya rezim Evo Morales di Bolivia? Hal ini menarik karena keterkaitan antara dinamika politik dalam negeri dan aktor politik luar negeri tidak terpisahkan dalam memengaruhi suatu rezim. Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori bertahan dan runtuhnya suatu rezim dari Mainwaring dan Linan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan keruntuhan rezim Morales dari sudut faktor politik yang lebih kompleks daripada hanya menggunakan argumen permukaan atau pendapat pada umumnya yaitu suatu rezim runtuh hanya karena lamanya rezim itu berkuasa.

Teori Bertahan dan Runtuhnya Suatu Rezim

Istilah rezim dapat diartikan sebagai pemerintahan yang memegang kendali atau kekuasaan. Rezim dalam dimensi organisasi/institusi dimengerti sebagai suatu sistem atau seperangkat norma atau

aturan. Menurut P.H Collin (2004: 208), rezim adalah suatu sistem, corak atau model pemerintahan yang berkuasa.

Literatur politik yang membahas mengapa suatu rezim bertahan atau jatuh/lengser telah banyak dibahas oleh beberapa karya, namun khusus runtuhnya rezim Morales di Bolivia masih sangat sedikit. Hlaing (2009) membahas mengapa junta militer masih bertahan di dalam struktur demokrasi di Myanmar. Hlaing berargumen karena faktor struktural dan kultural. Dimitrov (2011) membahas mengapa rezim komunis di beberapa negara seperti China, Kuba, Laos, Vietnam, dan Korea Utara masih bertahan. Dimitrov berpendapat bahwa terdapat beberapa perbedaan di beberapa negara tersebut, ada yang adaptif dengan perubahan dan ada yang masih memakai pola lama. Schwarz (2018) membahas mengapa rezim Soeharto tumbang selama 32 tahun berkuasa yaitu karena tekanan dari luar dan dalam negeri.

Araya (2017) membahas mengapa Evo Morales ingin terus memperpanjang kekuasaannya memakai pendekatan psikologi. Araya berpendapat bahwa karena individu Morales secara personal sebagai orang berani mengambil risiko. Mike Gonzalez (2019) memakai analisa ekonomi politik *Marxian* berpendapat runtuhnya rezim Morales karena kontradiksi internal ekonomi negara tersebut. Dari literatur yang ada belum memperlihatkan kompleksnya konstalasi politik domestik, maupun pengaruh dari luar negeri. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut.

Artikel ini memakai teori bertahan dan runtuhnya suatu rezim milik Mainwaring dan Linan. Scott Mainwaring dan Anibal Perez-Linan (2013) dalam bukunya berjudul *Democracies and Dictatorship in Latin America: Emergence, Survival, and Fall* membangun teori bertahan dan runtuhnya suatu rezim (*theory of regime survival and fall*). Teori ini dibangun atas data empiris yang panjang terkait bertahan dan jatuhnya para pemimpin negara-negara di Amerika Latin pada abad 20 dan 21. Oleh karena konteksnya yang sesuai, maka penulis memilih untuk menggunakan teori ini sebagai alat analisa.

Dalam teori ini, aktor politik ditempatkan sebagai pusat analisa. Aktor politik tidak selalu merujuk pada presiden, namun dapat juga merujuk selain presiden. Aktor politik dalam teori ini terbagi menjadi dua yaitu *most important political actors* dan *major actors*. *Most important actors* yaitu presiden atau organisasi yang sangat kuat, sedangkan *major actors* atau aktor besar terdiri dari militer, pemberontak, organisasi, gerakan sosial, lembaga non-pemerintah, asosiasi bisnis, dan serikat lainnya (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013: 11). Posisi aktor dapat tergantung pada

pembahasan peneliti apakah sedang merujuk pada aktor paling penting yaitu presiden ataukah kelompok penekannya yang berada dalam kategori *major actors*.

Aktor dianalisa menggunakan tiga variabel, yaitu: preferensi, kebijakan, dan politik internasional. Ketiga variabel tersebut berada dalam kategori *faktor politik*. Hal ini berbeda dengan teori pada umumnya yang menekankan faktor ekonomi, struktural, dan kultural seperti pembangunan, kelas, ketimpangan, dan budaya massa sebagai faktor penjelas suatu rezim bertahan atau runtuh (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013: 5).

Dari segi preferensi, aktor yang secara instrinsik tidak mempercayai demokrasi sebagai sistem yang paling baik mempunyai kecenderungan untuk menjadi pemerintah yang otoriter yang akhirnya membuat kubu oposisi semakin besar. Jika aktor paling penting dan kuat berpendapat bahwa demokrasi adalah bagian dari dominasi borjuis, tidak efisien, sarang korupsi, hambatan pertumbuhan ekonomi, maka suatu rezim rentan untuk runtuh (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013: 6).

Dari segi kebijakan, aktor politik yang mengambil kebijakan radikal (baik kiri maupun kanan) yang ditandai berayunnya kebijakan dari kutub satu ke kutub lainnya secara ekstrem akan membuat rezim tersebut rawan goyah. Aktor yang memilih kebijakan moderat akan cenderung dapat mempertahankan rezimnya. Dari segi dimensi internasional, faktor internasional dapat memengaruhi posisi aktor baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya melalui perantara domestik (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013: 16, 17).

Aktor dan kaitannya dengan koalisi akan dilihat dengan premis bahwa suatu rezim politik bertahan atau lengser tergantung seberapa kuat koalisi penyokong rezim. Rezim politik lengser apabila koalisi oposisi lebih kuat dari rezim itu sendiri dan sebaliknya (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013: 13). Suatu argumen umum dalam perpolitikan.

Berhubungan dengan oposisi, Mainwaring dan Linan mengajukan tiga premis penyebab bergantinya suatu rezim dari sudut aktor, yaitu: (1) munculnya aktor baru yang bergabung dalam oposisi, (2) distribusi relatif dari sumber daya politik yang ada berpihak/mendukung ke kubu oposisi, dan (3) cukupnya aktor politik yang berpindah sisi untuk menyeimbangkan kekuatan melawan rezim yang ada (Mainwaring & Pérez-Liñán, 2013: 49).

Oleh karena itu, penggunaan teori ini sebagai alat analisa akan mengikuti pola berikut: pertama, penulis menjelaskan faktor politik yang mempunyai variabel preferensi, kebijakan, dan

politik internasional. Kedua, penulis akan menjelaskan konstalasi politik oposisi dihubungkan dengan tiga premis yang disediakan Mainwaring dan Linan.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan luaran penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Neuman (2014: 38) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba menggambarkan detail spesifik suatu keadaan, relasi, atau situasi sosial. Tahapan analisa data mengikuti alur dari Flick (2013) yaitu mengikuti pola pengumpulan, kategorisasi, reduksi, pemadatan, dan interpretasi data.

Faktor Politik: Preferensi dan Kebijakan

Morales mempunyai preferensi yang lain mengenai demokrasi. Demokrasi yang dirujuk praktik kebijakan Morales tidak meyakini batasan periode seorang presiden merupakan hal yang esensial bagi demokrasi itu sendiri. Sepanjang masih banyaknya jumlah suara pendukung yang menginginkannya untuk menjadi seorang presiden dan kalkulasi kekuatan di legislatif, ia akan memperjuangkan dirinya sebagai presiden. Kecenderungan seperti itu membuat Morales seolah mempersonalisasi kekuasaan yang berakibat tidak ada kaderisasi atau munculnya kader yang dapat melanjutkan perjuangan. Hal ini kontraproduktif bagi Morales dan partai MAS itu sendiri sehingga melemahkan rezim waktu itu karena memperbesar kubu oposisi.

Preferensi dalam variabel ini menjelaskan terkait kepercayaan aktor terhadap demokrasi sebagai sistem yang paling baik. Kepercayaan ini tidak hanya dilacak dari teks dan retorika aktor, namun pada praktik yang menggambarkan kecenderungan aktor. Hal penting lainnya untuk menunjukkan praktik artikulasi kecenderungan adalah kebijakan apa yang dikeluarkan selama masa kepemimpinan Morales tersebut.

Terkait derajat demokrasi di Bolivia, Mainwaring dan Linan (2013: 66, 67) mengelompokkan Bolivia rentang waktu 1982-2006 masuk dalam kategori negara demokratis. Namun, pada 2007-2010 Bolivia berada dalam kategori semi-demokratis karena mengukur adanya penurunan derajat demokrasi di Bolivia. Terdapat empat dimensi agregasi yang digunakan, yaitu: *pertama*, presiden dan anggota legislatif harus dipilih melalui pemilihan terbuka yang kompetitif; *kedua*, pemilih merupakan mayoritas populasi dewasa; *ketiga*, sistem harus melindungi hak sipil dan politik (berbagai macam kebebasan); dan *keempat*, otoritas yang terpilih harus menjalankan

kekuasaan yang riil (tidak dalam bayang-bayang militer atau pihak manapun). Semakin empat dimensi tersebut hadir, semakin tinggi derajat demokrasi di suatu negara.

Kebijakan besar Morales jilid satu adalah mengupayakan perubahan konstitusi negara. Hal ini merupakan janji politik yang pada pidato pelantikan tahun 2006 diucapkannya kembali. Morales berkata: “As the parliament you have a task to fulfill: the *clamorous demand of the Bolivian people*, which is the *constituent assembly*...We want a constituent assembly of refoundation and not just a constitutional reform (dalam Thomson dkk., 2018: 670)”

Pada awal pelantikan, Morales menganggap bahwa perubahan atau modifikasi konstitusi adalah sesuatu hal yang wajar, tidak sesakral apapun yang dibayangkan. Perubahan tersebut dapat terjadi selama ada dukungan kekuatan besar di legislatif dan masyarakat khususnya masyarakat adat yang memihak presiden. Demokrasi diterjemahkan sebagai sistem pengejawantahan keinginan masyarakat. Jadi, selama Morales berhitung masih banyak masyarakat yang membutuhkannya, ia akan masih bisa menjadi presiden berturut-turut dengan melakukan referendum atau kanal institusional lainnya terlebih dahulu.

Meskipun preferensi aktor tidaklah statis, namun apa yang dipraktikkan dalam horizon 2006 – 2019 masih menunjukkan hal yang sama. Pandangan yang bertarung terkait demokrasi dan pembatasan umur kekuasaan bagi seorang presiden adalah kekuasaan yang begitu lama atau terus diperpanjang melewati periode yang telah ditetapkan akan dipersepsikan publik ke arah otoritarian, namun bagi aktor yang memegang kekuasaan menganggap bahwa hal itu demi kebaikan negara, konstituennya, dan agenda politik yang telah direncanakan dan dijalankan. Mainwaring dan Linan (2013: 273) berpendapat bahwa ketika aktor secara instrinsik normatif meyakini dan berkomitmen ke demokrasi, aktor tersebut akan menoleransi realitas yang tidak memihak dirinya untuk menghindari masuknya ke dalam golongan otoriter.

Ide dan praktik yang membatasi masa jabatan seseorang yang dipilih publik secara historis berusia sama tua dengan praktik demokrasi itu sendiri. Praktik itu dimulai dari zaman Yunani Kuno di Athena yang membatasi dua kali masa jabatan bagi pejabat terpilih, tertulis pertama kali dalam konstitusi Perancis tahun 1795, dimajukan oleh Simon Bolivar, dan termaktub dalam konstitusi negara-negara yg merdeka pada abad 19, 20, dan sampai saat ini (Alexander, 2014). Batas masa dan periode jabatan merupakan hal yang essensial dan menjadi norma dalam demokrasi itu sendiri. Hal tersebut yang membedakannya dengan sistem yang lain.

Meskipun jalur konstitusional menyediakan ruang untuk melakukan referendum, plebisit, atau jalur dekrit, namun seorang presiden yang memilih untuk tidak menggunakan fasilitas yang disediakan untuk memperpanjang periode kekuasaannya membuktikan kepatuhan dan kepercayaan intrinsik seorang presiden terhadap demokrasi itu sendiri. Preferensi tafsir demokrasi yang lain bagi Morales menunjukkan kecenderungan Morales mempersonalisasi kekuasaan.

Personalisasi kekuasaan itu terbukti pada 2016. Morales mendorong dan menggunakan ruang referendum untuk melakukan amandemen konstitusi yang dapat memfasilitasi kepentingan untuk menjabat keempat kalinya secara berturut-turut. Meskipun hasilnya sangat tipis dengan kekalahan Morales yaitu 51% untuk “no” dan 49% untuk “yes” (Hirsland & Strijbis, 2019), namun penggunaan ruang referendum untuk periode jabatan presiden telah menunjukkan personalisasi kekuasaan yang secara ide lama demokrasi dicegah untuk terjadi yaitu dengan tujuan menghindari despotisme dan seolah hanya aktor itu saja yang dapat menyelamatkan segalanya.

Pada Desember 2018, partai berkuasa MAS mengumumkan Morales lagi sebagai calon presiden untuk pemilihan tahun 2019 (Guardian, 2018). Pertimbangan selisih hasil referendum yang sangat kecil yaitu kurang lebih 2% membuat partai berkuasa MAS percaya diri untuk memajukan lagi Morales, meskipun hal tersebut menentang hasil referendum. Dalihnya dengan menggunakan alasan hak politik individu Morales untuk dicalonkan sebagai presiden sebagai bagian dari hak asasi manusia. Keputusan tersebut menghasilkan polarisasi masyarakat Bolivia yang semakin tebal. Hal ini kontraproduktif dengan agenda politik partai MAS karena seolah ketiadaan kader dan menjadi titik terbesar serangan oposisi yang melemahkan rezim.

Bagi pihak oposisi, semakin cepat membuat Morales meninggalkan istana semakin baik karena kemungkinan jika Morales ikut lagi dalam pemilihan berikutnya, belum ada tokoh yang bisa menandingi popularitas dan elektabilitas Morales. Hal ini berarti memperbesar serangan oposisi ke Morales paska referendum 2016 menjadi pilihan paling rasional. Bagi oposan, meruntuhkan rezim dapat dipayungi dalam semangat *restoring democracy*. Bagi pihak yang berkuasa, dalam hal ini Morales dan partai MAS, protes masyarakat dan serangan kudeta adalah yang paling memungkinkan muncul.

Kebijakan lain yang ekstrem dalam pengertian berayunnya kebijakan dari kutub satu ke kutub lainnya adalah nasionalisasi sektor minyak dan gas, legalisasi koka serta pembangunan infrastuktur yang mendukung sektor tersebut. Kebijakan nasionalisasi sektor gas diambil hanya beberapa bulan setelah pelantikan Morales menjadi presiden pada 2006. Sampai pada 2016,

nasionalisasi sektor minyak dan gas menghasilkan USD 31.5 milyar (EFE, 2016). Mesin pendapatan dari nasionalisasi dan naiknya harga komoditas memungkinkan Morales untuk membelanjakan pendapatan negara ke program sosial yang diinisiasinya.

Kebijakan ekonomi yang mengandalkan sektor ekstraktif dipandu oleh negara tersebut menimbulkan tensi politik. Kebijakan ekonomi tidak hanya berurusan dengan konstalasi aktor dan distribusi ekonomi yang berubah, namun relasi kuasa yang ada di dalamnya. Marston & Kennemore (2019) menjelaskan bahwa paradoks terjadi dalam agenda politik Morales yaitu antara legitimasi negara terhadap pendapatan andalan yang berasal dari kegiatan *ekstrativisme* dengan retorika perlindungan alam dan otonomi masyarakat adat di sisi lainnya. Narasi revolusi membungkam oposisi dan debat seputar isu ekonomi ekstraktif oleh negara. Selama dua belas tahun, kritik terhadap Morales selalu diperhadap-hadapkan antara kubu elit di dataran rendah dengan kubu basis pendukung MAS.

Salah satu reaksi besar muncul dari kebijakan infrastruktur mendukung sektor agrikultur koka adalah demonstrasi masyarakat adat pada September 2011 terkait penolakan pembangunan 300 km jalan yang melewati TIPNIS (*Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécuré/Isoboro Sécuré National Park and Indigenous Territory*). Lebih seribu orang masyarakat adat dataran rendah (dalam payung gerakan CIDOB-*Confederation of Indigenous Peoples of the East, Chaco, and Bolivian Amazon*) berjalan kaki dari kota Beni ke La Paz untuk melakukan protes pada pertengahan Agustus sampai awal September 2011. Protes tersebut disikapi represif oleh aparat. Pada akhirnya, tuntutan masyarakat adat terkabul, Morales menunda pembangunan jalan tersebut (Guardian, 2011).

Beberapa karya berpendapat bahwa awal Evo Morales kehilangan kepercayaan di masyarakat adat yang melemahkan rezim dan memengaruhi suara nantinya adalah akibat dari kejadian demonstrasi tersebut (Fabricant & Postero, 2015; Hope, 2016; McNeish, 2013; Springerová & Vališková, 2016). Namun, protes tersebut tidak signifikan dalam meruntuhkan rezim dilihat dari efek kejadiannya terhadap jumlah suara dukungan ketika Morales mencalonkan diri menjadi presiden pada pemilihan tahun 2014 atau tiga tahun setelah kejadian TIPNIS.

Sebelum pemilihan presiden pada 12 Oktober 2014, survei menunjukkan bahwa terdapat 40% margin kemenangan telak Morales atas rivalnya Doria Medina (Achtenberg, 2014). Dapat dilihat pada persentase kesalahan survei sebelum pemilihan itu hanya 3,6% dari hasil resmi penghitungan suara nantinya. Jika beberapa karya tersebut tepat memprediksi, maka niscaya

Morales tidak akan memenangkan pemilu tahun 2014 atau jikapun menang Morales hanya akan memperoleh kemenangan tipis.

Efek dari kejadian tersebut tidak menyangkut hilangnya kepercayaan masyarakat adat atau tergerusnya suara dukungan kepada Morales. Namun, semakin membesar dan memperbanyak simpul-simpul oposisi yang nantinya mendapat momentum dan terhubung satu dengan yang lainnya. Pemberitaan media arus utama yang mengkerangka protes tersebut sebagai penanda lepasnya pegangan Morales di masyarakat adat hanyalah efek gelembung.

Alasan lainnya bahwa protes TIPNIS tidak signifikan melemahkan rezim karena respons pihak yang berkuasa pasca protes. Respons pemerintahan Morales dan partai MAS dalam kategori cepat dan tepat sasaran dengan cara memobilisasi sumber daya politik dalam berbagai ranah. Respons pemerintah, partai dan pendukung Morales untuk konter oposan yaitu keluarnya kebijakan penghentian pembangunan jalan, aktor intelektual Morales yaitu wakil presiden Alvaro Garcia Linera—seorang Marxis—menerbitkan buku *Geopolitics of the Amazon* (2012) yang meyakinkan publik bahwasannya terjadi kontradiksi internal dan gesekan aktor-aktor kapitalis lama di kawasan tersebut, dan demonstrasi tandingan masyarakat adat pada Januari 2012.

Model tandingan demonstrasi pro-pembangunan jalan juga sama dengan demonstran kontra-pembangunan jalan yaitu menunjukkan kekuatan dan mengumpulkan massa dengan berjalan kaki selama 40 hari. Argumen demonstran yaitu pembangunan jalan yang menghubungkan daerah San Ignacio de Moxos dengan Villa Tunari akan membuka keterisolasian mereka dan peluang ekonomi. Pihak oposisi menjelaskan para demonstran pro-pembangunan jalan tersebut adalah petani koka yang berasal dari daerah sekitar Villa Tunari, daerah Morales mengawali karir politik sebagai pemimpin komunitas (BBC News, 2012). Selain itu, Robb dkk. (2015) menyatakan keluarnya UU pertambangan pada 2014 yang berpihak ke koperasi pertambangan milik masyarakat adat dapat mengamankan suara pemilih segmen tertentu pada pemilihan presiden tahun 2014.

Politik Internasional

Pada variabel ini penulis berargumen bahwa politik internasional memengaruhi pelemahan rezim. OAS (*Organization of American States*) sebagai aktor politik berpengaruh secara langsung terhadap pelemahan rezim dengan cara menggiring opini masyarakat domestik Bolivia dan internasional dengan mendiskreditkan kemenangan Morales pada pemilihan tahun 2019. Hal

tersebut menambah dukungan terhadap demonstran domestik anti-Morales pasca pemilihan pada Oktober 2019 sampai akhirnya Morales menyerah pada 10 November 2019. Munculnya OAS sebagai aktor politik internasional tidak dapat dilepaskan dari surutnya dan penuh gesekannya relasi pemerintahan Morales dengan pemerintah Amerika Serikat (AS) sebagai pemain penting di kawasan Amerika Latin (Mark Weisbrot 2019).

Seperti beberapa pemimpin yang beraliran kiri, Morales membawa kebijakan luar negeri Bolivia menentang hegemoni AS dan praktik neoliberalisme. Dalam lanskap politik kawasan Amerika Latin terdapat dua kategori rezim yaitu rezim yang disokong AS dan rezim yang menentang AS. Haluan politik luar negeri di negara-negara Amerika Latin apakah “mendekati” atau “menjauhi” AS dapat terbaca dengan melihat preferensi ideologi pemimpin yang berkuasa. Morales juga muncul dalam semangat era *pink tide*.

Awal berkuasa, Morales memperkuat aliansi dengan Castro – Kuba, Chavez – Venezuela, Lula – Brazil, dan Correa – Ekuador. Salah satu wujud koordinasinya melalui blok organisasi sub-regional ALBA (*Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America*). Morales menyintesis inspirasi dari kepemimpinan Castro dalam mengelola negara komunis Kuba, Chavez yang berhasil naik dari proses demokrasi lalu menasionalisasi sektor minyak dan gas, serta modernisasi yang dilakukan Lula yang berhasil mengangkat perekonomian Brazil.

Relasi dengan AS dalam kondisi surut dengan beberapa kejadian. Mengikuti tren pemimpin kiri yang mengusir duta besar AS di negaranya seperti Chavez di Venezuela, Morales juga mengusir duta besar Philip S. Goldberg dan agen US DEA (*Drug Enforcement Administration*) pada 2008 dengan tuduhan membantu pihak oposisi melakukan kekacauan dan menentang kebijakan obat terlarang. Morales juga menerapkan *persona non grata* terhadap diplomat AS yaitu Fransisco Martinez dengan tuduhan melakukan kontak dengan kelompok oposisi pada 2009. Pada 2013, Morales juga mengusir agensi USAID dengan tuduhan membiayai oposisi di dataran rendah (Guardian, 2013). Intelektual Marxis dan juga wakil presiden Garcia Linera (2012) berpendapat bahwa USAID memperkuat relasi klien akan ketergantungan terhadap pendonor dan menawarkan pola pikir bahwa hutan Amazon adalah milik semua pihak, padahal realitasnya perusahaan-perusahaan asal AS yang memainkannya.

Menurut Burrton (2012) intervensi AS dalam politik Bolivia bukanlah hal baru. Menurut penelitiannya sampai awal Morales jilid dua, pemerintah AS menggunakan dua taktik yaitu keras dan halus sebagai respon pemerintahan kiri Morales. Taktik yang lebih halus merangkul dan

mendorong masyarakat sipil lebih moderat melalui beberapa lembaga dan program. Kombinasi taktik tersebut bertujuan untuk mengganti rezim.

Surutnya relasi dengan AS tersebut membuat Morales mengalihkan perhatian ke mitra ekonomi asia yaitu China dan Korea Selatan. Beberapa investasi dan kerja sama perdagangan telah dilakukan seperti Bolivia memesan enam helikopter dan satu satelit komunikasi dari China (Pineo, 2016). Kuatnya gesekan dengan AS tersebut membuat OAS (*Organization of American States*) muncul sebagai aktor politik yang memainkan peran signifikan dalam melemahkan rezim Morales. Johnson (2019) berpendapat bahwa investasi AS di sejumlah negara OAS memengaruhi pengambilan keputusan di organisasi tersebut.

Mark Weisbrot (2019) berpendapat bahwa pengumuman hasil riset OAS, sehari setelah pemilihan, yang menyatakan bahwa terdapat kecurangan yang memenangkan Morales merupakan upaya pemerintahan Trump untuk mendiskreditkan hasil pemilihan. Pada tanggal 20 Oktober 2019, rakyat Bolivia memilih presiden dan kongres dengan hasil Morales memenangkan 47,1% suara disusul saingan calon yang lebih disukai pemerintah AS yaitu Carlos Mesa dengan 36,5% suara. Hal ini berarti tidak perlu melakukan pemilihan putaran kedua karena kemenangan Morales telah lebih dari 40% dengan jarak kemenangan 10%. Tudingan OAS tidak diikuti dengan bukti yang meyakinkan.

Hasil riset OAS tersebut menggiring opini dan semakin membesarkan tuntutan kepada Morales untuk mundur. Hal yang juga membuat massa secara jumlah semakin membesar adalah margin kekalahan Mesa sekitar 10% yang berarti merupakan margin terkecil kekalahan penantang Morales di semua pemilihan umum sebelumnya. Hal ini berarti jumlah anti-Morales meningkat. Tuntutan massa melalui demonstrasi beberapa pekan tanpa henti membuat Morales mengambil keputusan untuk mundur dari jabatan presiden pada tanggal 10 November 2019.

Oposisi dan Premis

Penting untuk melihat oposisi dalam kompleksitas fenomena kejatuhan suatu rezim. Pada bagian ini penulis berargumen bahwa terdapat dinamika kubu oposisi dari awal Evo Morales menjabat sampai pada akhir ia digulingkan, dari oposisi tradisional ke kontemporer. Dinamika tersebut meliputi penambahan aktor dan isu kubu oposisi. Penambahan aktor terkait beberapa kejadian seperti protes masyarakat adat terkait pembangunan jalan melewati kawasan TIPNIS, munculnya aktor baru misalnya Camacho, dan kubu militer yang berbalik membelakangi presiden.

Untuk penambahan isu yaitu naiknya isu konservatif agama Katolik sebagai penyeimbang isu masyarakat adat yang digarap Morales selama berkuasa. Walaupun Morales sendiri seorang penganut Katolik, namun pada praktiknya isu Katolik tertinggal di belakang isu masyarakat adat. Morales gagal menyeimbangkan kutub restrukturisasi ekonomi, emansipasi adat, dan unsur Katolik. Tiga premis yang diajukan Mainwaring dan Linan terbukti dalam hal ini, namun terdapat penambahan premis menurut penulis yaitu salah langkah/*blunder* oleh pihak berkuasa serta pendukungnya juga turut andil dalam meruntuhkan suatu rezim.

Premis munculnya aktor baru yang menjadi tokoh simbolis pemersatu demonstran anti-Morales adalah Luis Fernando Camacho. Sebelumnya tokoh ini tidak begitu dikenal luas oleh masyarakat, namun momentum dan *blunder* politik berpihak kepadanya.

Camacho membingkai isu konservatif Katolik sebagai ramuan utama untuk melawan narasi masyarakat adat yang telah diprioritaskan Morales selama berkuasa. Isu ini menaikkan narasi untuk kembali menghadirkan agama Katolik di Bolivia yang sejak beberapa tahun ditinggalkan Morales karena pertimbangan berkontradiksi dengan kepercayaan lokal masyarakat adat. Selain kelas, politik identitas dalam hal ini yaitu ras dan agama menjadi indikator yang penting. Politik identitas yang diolah Morales selama lebih dari 13 tahun menggelinding berbalik menyerang kekuasaannya.

Selain alasan perjuangan mengangkat derajat dan memperbaiki ekonomi, secara politik alasan Morales dan partai MAS memprioritaskan masyarakat adat adalah sangat rasional dengan pertimbangan jumlah suara 30%-40% seperti yang telah dituliskan sebelumnya. Dengan persentase suara seperti itu, sangat masuk akal di setiap kemenangan Morales selalu melebihi angka tersebut. Penambahan elemen suara lain melalui kerja politik akan memungkinkan Morales melebihi perolehan 40% suara. Sebagai buktinya dapat dilihat pada kemenangan tahun 2009 sebesar 64% suara dan 2014 sebesar 61% suara seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Camacho menangkap peluang politik bahwa penyeimbang isu dan jumlah suara masyarakat adat adalah pengikut agama Katolik, sedangkan momentum politik didapatnya ketika protes terhadap Morales jilid empat. Nugent (2019) menuliskan bahwa semenjak konstitusi baru 2009, presiden dan wakil presiden serta pejabat negara tidak lagi disumpah memakai Alkitab dan sesuai kepercayaan Katolik pada saat pelantikan. Sebelumnya, ajaran Katolik memainkan peran signifikan dalam ruang negara Bolivia. Pada survei pada 2006 terdapat 75% populasi Bolivia menganut Katolik, agama yang dibawa orang Eropa ketika era kolonialisme lama. Konstitusi baru

2009 tidak lagi menempatkan Katolik sebagai agama resmi dominan di Bolivia. Camacho dalam mengampanyekan protesnya menggunakan Alkitab sebagai simbol protes tanpa senjata, dijuluki evangelis Bolsonaro Bolivia. Hal ini disambut juga dengan oposan tradisional Morales di parlemen yakni politisi perempuan bernama Jeanine Anez yang juga seorang Katolik konservatif. Anez nantinya yang menjabat sebagai presiden interim di Bolivia sepeninggal Morales.

Menurut antropolog Arancibia (dalam Walters, 2019), Camacho merupakan potret dari generasi elit baru di Bolivia yang kekayaannya didapatkan dari keturunan elit oligarki di Santa Cruz. Camacho memiliki sejarah kelam sebagai wakil pemimpin ultra sayap kanan organisasi Unión Juvenil Cruceñista yang ketika konflik gas tahun 2003 menindas masyarakat adat dan kelas bawah. Namun pada protes November 2019, Chamacho bersimpul dengan beberapa gerakan masyarakat adat anti-Morales yang banyak bermunculan setelah kejadian protes pembangunan jalan melewati TIPNIS.

Awal Camacho naik menjadi figur nasional juga akibat dari pendukung partai MAS yang salah langkah/*blunder*. Arancibia (dalam Walters, 2019) menceritakan pada 4 November 2020 ketika Camacho datang ke La Paz untuk mengantar surat tuntutan agar presiden Morales mengundurkan diri, para pendukung partai MAS menutup bandara yang tidak memperbolehkan siapapun keluar masuk. Polisi dan militer disorot tajam karena tidak bisa berbuat apa-apa mengendalikan pendukung partai MAS. Hal ini disiarkan oleh media daring dan massa yang mentransformasikan Camacho dari figur daerah menjadi nasional. Munculnya kembali formasi kekuasaan lama *white-mestizo*.

Camacho yang berasal dari Santa Cruz juga tidak dapat dilepaskan dari geopolitik Bolivia. Secara tradisional semenjak Morales naik menjadi presiden di 2006 dan mengeluarkan kebijakan ekstrem, Morales dan mesin partai MAS tidak begitu sukses mempertahankan rangkulan pemilih lingkaran konsentris daerah dataran rendah dengan sebutan *Media Luna* atau daerah bulan sabit di timur Bolivia. Departemen (istilah administrasi kawasan yang terdiri dari beberapa provinsi yang dipimpin oleh seorang Gubernur) seperti Santa Cruz, Beni, Pando, dan Tarija merupakan basis kubu oposisi yang daerahnya kaya dengan sumber daya alam yang ditata ulang oleh Morales. Gesekan ekonomi politik dari oligarki lama ke baru membuat kubu oposan semakin besar.

Elektoral geografis Santa Cruz telah menunjukkan tekanan yang lebih besar kepada rezim Morales utamanya semenjak pemilihan 2014. Walaupun Morales menang, namun suara anti-pemerintah juga turut membesar di Santa Cruz. Hirsland (2019) menjelaskan pada pemilihan

2014, MAS menang 61,4% suara, oposisi yang terkuat dari kubu sayap kanan UD (*Union Democratic*) dan liberal dari dataran rendah Santa Cruz meraup sebanyak 24,2%. Di Santa Cruz juga pernah terjadi percobaan pembunuhan terhadap Morales.

Rakyat Bolivia yang terbelah sudah terjadi sejak awal terpilihnya Morales menjadi presiden. Polarisasi waktu itu melibatkan masyarakat pribumi dan blok bagian timur yang borjuis. Hal tersebut diwakilkan oleh sosok Evo Morales dan Carlos Mesa. Polarisasi kemudian meluas pada ras, kelas, dan wilayah (Webber, 2010). Pada 2019, kedua sosok yang secara tradisional ini bersebrangan kemudian berkompetisi kembali dengan menebalkan polarisasi yang telah ada sejak 16 tahun yang lalu.

Menurut Obarrio (2010) pusat basis pendukung MAS secara geografis terletak di daerah dataran tinggi Chohacamba Chapare, daerah utama produsen daun koka. Semakin jauh dari pusat kota, semakin besar jumlah pendukung MAS. Kenaikan jumlah suara pendukung MAS dan Morales berasal mayoritas dari pedesaan, seiring taktik politik dari pinggiran ke kota yang digarap oleh partai MAS. Arancibia (dalam Walters, 2019) berpendapat bahwa pendukung yang mayoritas berada di pinggiran tersebut tidak banyak membantu ketika kaum oposisi turun ke jalan menekan Evo Morales di perkotaan. Kelas menengah masyarakat adat yang tercipta dalam rezim Morales memilih pasif melindungi properti mereka masing-masing.

Premis distribusi relatif dan aktor yang berpindah sisi yang paling utama adalah kubu militer. Modal politik yang telah ditanam Morales dengan menempatkan Williams Kaliman di posisi panglima militer dan Vladimir Calderon Mariscal sebagai kepala kepolisian ternyata tidak berfungsi melindunginya pada saat genting. Protes yang semakin membesar dan konstan setelah pengumuman hasil pemilihan pada Oktober 2019 membuat dua petinggi tersebut berdiri di belakang demonstran dan menyarankan Morales untuk mundur.

Terdapat friksi di kubu militer antara tentara yang aktif dan petinggi militer. Tentara yang aktif berpangkat rendah ingin melindungi presiden dan mengambil sikap terhadap demonstran, namun pimpinan pada tiga matra berbeda menekan panglima Kaliman untuk tidak mengambil sikap terhadap demonstran karena terkait dengan isu politik. Tentara akhirnya hanya pasif dan menjaga agar tidak terjadi penjarahan, penorobosan batas negara, dan sebagainya (Anoticia, 2019). Oleh karena militer yang tidak memihak Morales saat genting tersebut, maka Morales berargumen bahwa telah terjadi kudeta menggulingkan dirinya.

Simpulan

Faktor politik yang memengaruhi runtuhnya rezim Evo Morales dapat dilihat menggunakan tiga variabel yang ditawarkan Mainwaring dan Linan yaitu preferensi, kebijakan, dan politik internasional. Untuk preferensi terhadap demokrasi, Morales tidak menimbang bahwa pembatasan periode jabatan merupakan hal yang krusial dan esensial bagi demokrasi itu sendiri. Demokrasi lebih ditekankan pada fungsinya terutama untuk struktur dan distribusi ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Selama masih banyak konstituen dan dukungan parlemen, Morales dan partai MAS berkalkulasi hal tersebut bisa dijadikan pondasi untuk mencalonkan kembali sebagai presiden dengan perpanjangan periode. Hal ini membuat besarnya tekanan kepada partai karena seolah tidak ada regenerasi kader dan Morales yang mempersonalisasi kekuasaan.

Variabel kebijakan memperlihatkan kebijakan yang dikeluarkan cukup ekstrem dalam pengertian berayunnya kebijakan dari kutub yang satu ke kutub yang lainnya. Dimulai dari nasionalisasi sektor gas dan minyak, usulan dan kawalan terhadap perubahan konstitusi negara, melegalkan koka sebagai sumber pendapatan, pembangunan jalan melewati kawasan taman nasional TIPNIS, kebijakan referendum yang tidak dipatuhi, kebijakan partai mencalonkan kembali Morales pada pemilihan 2019, dan sebagainya. Kebijakan yang terlalu mengkonsolidasikan ke dalam jaring kekuasaan Morales dan MAS menciptakan oposan yang semakin besar dan dengan isu yang beragam. Simpul-simpul oposisi nantinya menemukan peluang dan momentum politik untuk menyerang rezim bersama-sama.

Variabel politik internasional juga terpengaruh dari kebijakan dan sikap yang dipilih oleh Evo Morales dan partai berkuasa MAS. Surut dan tebalnya gesekan dengan pemerintahan AS membuat sejumlah resiko bertambahnya tekanan ke rezim. Aktor penting yang muncul di babak akhir rezim Morales adalah OAS. OAS mendeskreditkan hasil pemilihan 2019 yang memenangkan Morales.

Tiga premis yang ditawarkan Mainwaring dan Linan terkait pembahasan khusus mengenai oposisi terbukti ada, yaitu: *pertama*, munculnya aktor baru yang bergabung ke oposisi, dalam hal ini Camacho, *kedua*, distribusi relatif sumber daya politik mendukung ke kubu oposisi hal ini ditandai dengan tekanan legislatif yang diwakili oleh Jeanine Anez, dan *ketiga*, aktor politik yang berpindah menjadi oposan yakni kelompok masyarakat adat pasca demonstrasi TIPNIS dan pihak militer yang pasif membela Morales pada saat genting. Faktor penguasa salah langkah juga turut berpengaruh membesarkan oposisi. Salah langkah di sini ketika pendukung MAS melakukan hal

yang tidak perlu yang efeknya mengakselerasi munculnya aktor oposisi baru yaitu Camacho yang nantinya berhasil menjual ide konservatif Katolik ke masyarakat yang lebih luas sebagai ramuan tambahan menekan rezim.

Referensi

- Alexander, B. (2014). Democracy, dictatorship, and term limits. In *Democracy, Dictatorship, and Term Limits*. <https://doi.org/10.1080/01402382.2015.1008834>
- Anoticia. (2019). Denuncian Que Hubo Fricciones Entre Jefes Militares Y Kaliman. Diambil 22 Juli 2020, dari <http://www.anoticia2.com/2019/10/denuncian-que-hubo-fricciones-entre.html>
- Arana Araya, I. (2017). What Drives Evo's Attempts to Remain in Power? A Psychological Explanation. *Bolivian Studies Journal/Revista de Estudios Bolivianos*. <https://doi.org/10.5195/bsj.2016.167>
- Balch, O. (2019, Maret 7). How a populist president helped Bolivia's poor – but built himself a palace. Diambil 18 Juli 2020, dari <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/07/how-a-populist-president-helped-bolivias-poor-but-built-himself-a-palace>
- BBC News. (2012). Bolivia march revives Tipnis Amazon road dispute. Diambil 15 Juli 2020, dari <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-16804399>
- Burron, N. (2012). Unpacking U.S. democracy promotion in Bolivia: From soft tactics to regime change. *Latin American Perspectives*. <https://doi.org/10.1177/0094582X11423223>
- Collin, P. H. (2004). Dictionary of Politics and Government, Third Edition. In Peter Holmes (Ed.), *The Politics and Government of Switzerland*. London: Peter Collin Publishing.
- Constitution, B. (2009). Bolivia Constitution. Diambil 15 Juli 2020, dari Constitute Project website: https://www.constituteproject.org/constitution/Bolivia_2009.pdf
- Dimitrov, M. K. (2011). Why communism did not collapse: Understanding authoritarian regime resilience in Asia and Europe. In *Why Communism did not Collapse: Understanding Authoritarian Regime Resilience in Asia and Europe*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139565028>
- EFE. (2016). YPFB: Bolivia's oil and gas nationalization generated \$31.5 bn over a decade. Diambil 15 Juli 2020, dari <https://www.efc.com/efe/english/business/ypfb-bolivia-s-oil-and-gas-nationalization-generated-31-5-bn-over-a-decade/50000265-2898302>
- Fabricant, N., & Postero, N. (2015). Sacrificing Indigenous Bodies and Lands: The Political-Economic History of Lowland Bolivia in Light of the Recent TIPNIS Debate. *Journal of Latin American and Caribbean Anthropology*. <https://doi.org/10.1111/jlca.12173>
- Flick, U. (2013). *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publications.
- Guardian. (2011). Bolivians march against Evo Morales over jungle highway crackdown. Diambil 15 Juli 2020, dari <https://www.theguardian.com/world/2011/sep/29/bolivians-march-against-evo-morales>
- Guardian. (2013, Mei 1). Bolivia expels US agency for undermining government. Diambil 20 Juli 2020, dari <https://www.theguardian.com/world/2013/may/01/bolivia-expels-us-agency>
- Guardian. (2018). Bolivia's president Evo Morales to run again despite referendum ruling it out. Diambil 15 Juli 2020, dari <https://www.theguardian.com/world/2016/dec/18/bolivias-president-evo-morales-to-run-again-despite-referendum-ruling-it-out>
- Hirsland, A. S., & Strijbis, O. (2019). 'We were forgotten': explaining ethnic voting in Bolivia's highlands and lowlands. *Journal of Ethnic and Migration Studies*.

- <https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1492371>
- Hope, J. (2016). Losing ground? Extractive-led development versus environmentalism in the Isiboro Secure Indigenous Territory and National Park (TIPNIS), Bolivia. *Extractive Industries and Society*. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2016.10.005>
- Johnson, S. (2019). Neorealism and the Organization of American States (OAS): An Examination of CARICOM Rationality Toward Venezuela and the United States. *SAGE Open*. <https://doi.org/10.1177/2158244019887950>
- Kathryn Robb, Mark Moran, Victoria Thom, J. C. (2015). Indigenous Governance and Mining in Bolivia. Diambil 20 Juli 2020, dari The University of Queensland website: <https://united4changecenter.org/wp-content/uploads/2017/05/32-Bolivia-Mining-Report-2015.pdf>
- Kohl, B. (2010). Bolivia under morales: A work in progress. *Latin American Perspectives*. <https://doi.org/10.1177/0094582X10366533>
- Linda C. Farthing, B. H. K. (2014). *Evo's Bolivia: continuity and change*. <https://doi.org/10.7560/757271>
- Linares, Á. G. (2012). Geopolitics of the Amazon: Landed-Hereditary Power and Capitalist Accumulation. Diambil 18 Juli 2020, dari <https://climateandcapitalism.com/wp-content/uploads/2013/01/Geopolitics-of-the-Amazon-8x11.pdf>
- Madrid, R. L. (2012). *The Rise of Ethnic Politics in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mainwaring, S., & Pérez-Liñán, A. (2013). Democracies and dictatorships in Latin America: Emergence, survival, and fall. In *Democracies and Dictatorships in Latin America: Emergence, Survival, and Fall*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marston, A., & Kennemore, A. (2019). Extraction, Revolution, Plurinationalism: Rethinking Extractivism from Bolivia. *Latin American Perspectives*. <https://doi.org/10.1177/0094582X18781347>
- McNeish, J. A. (2013). Extraction, Protest and Indigeneity in Bolivia: The TIPNIS Effect. *Latin American and Caribbean Ethnic Studies*. <https://doi.org/10.1080/17442222.2013.808495>
- Mike Gonzalez. (2019). *The Ebb of the Pink Tide: The Decline of the Left in Latin America*. London: Pluto Press.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Pearson.
- Nugent, C. (2019). How Bolivia's Evo Morales Was Brought Down With the Help of an Obscure Conservative With a Bible. Diambil 20 Juli 2020, dari Time website: <https://time.com/5728279/luis-fernando-camacho-bolivia/>
- Oviedo Obarrio, F. (2010). Evo Morales and the Altiplano: Notes for an Electoral Geography of the Movimiento al Socialismo, 2002—2008. *Latin American Perspectives*, 37(3), 91–106. <https://doi.org/10.1177/0094582X10364035>
- Pineo, R. (2016). Progress in Bolivia: Declining the United States Influence and the Victories of Evo Morales. *Journal of Developing Societies*. <https://doi.org/10.1177/0169796X16667170>
- Postero, N. (2017). The Indigenous State: Race, Politics, and Performance in Plurinational Bolivia. In *The Indigenous State: Race, Politics, and Performance in Plurinational Bolivia*. <https://doi.org/10.1525/luminos.31>
- Schwarz, A., & Schwarz, A. (2018). The fall of Soeharto. In *A Nation in Waiting*. <https://doi.org/10.4324/9780429495489-11>
- Sinclair Thomson, Rossana Barragán, Xavier Albó, Seemin Qayum, M. G. (2018). *The Bolivia*

- Reader: History, Culture, Politics*. London: Duke University Press.
- Springerová, P., & Vališková, B. (2016). Territoriality in the development policy of Evo Morales' government and its impacts on the rights of indigenous people: The case of TIPNIS. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*. <https://doi.org/10.1080/08263663.2016.1182297>
- UN. (2020). No Title. Diambil 1 Juni 2020, dari <https://data.un.org/en/iso/bo.html>
- Van Cott, D. L. (2005). From movements to parties in Latin America: The evolution of ethnic politics. In *From Movements to Parties in Latin America: The Evolution of Ethnic Politics*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511756115>
- Walters, J. (2019). Bolivia's Path to Camacho. Diambil 20 Juli 2020, dari Nacla website: <https://nacla.org/news/2019/11/13/bolivia-path-camacho-interview-morales>
- Webber, J. R. (2010). Carlos mesa, evo morales, and a divided bolivia (2003-2005). *Latin American Perspectives*. <https://doi.org/10.1177/0094582X10364033>
- Weisbrot, M. (2019). The Trump Administration Is Undercutting Democracy in Bolivia. Diambil 20 Juli 2020, dari The Nation website: <https://www.thenation.com/article/archive/bolivia-election-oas/>